

Sekuritisasi Isu Imigran di Amerika Serikat di Masa Pemerintahan Donald Trump

Anisa Usman^{1*}, Haiyyu Darman Moenir^{2*}, Bima Jon Nanda^{3*}

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: ¹anisausman9@gmail.com*, ²haiyyu_darman@yahoo.com*, ³bimajon@gmail.com*

Abstrak

Isu sekuritisasi mengenai imigran di AS merupakan isu yang telah menjadi perbincangan public sejak kampanye Donald Trump sebagai calon presiden AS pada pemilu 2016. Dia telah secara terbuka menyampaikan retorika anti-imigran xenofobia. Peneliti berasumsi bahwa adanya sekuritisasi menjadikan isu imigran sebagai ancaman yang membahayakan keamanan nasional AS. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan tindak tutur untuk mempengaruhi opini publik, sehingga menjadikan isu imigran sebagai masalah yang memerlukan penanganan darurat atau kebijakan luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan proses sekuritisasi terhadap isu imigran di AS pada masa pemerintahan Donald Trump. Penelitian ini dianalisis dengan kerangka konseptual tahapan sekuritisasi Barry Buzan, Waever, dan Jaap de Wilde, yang terdiri dari tahap memunculkan isu dan tahap meyakinkan khalayak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif-analisis dan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa proses sekuritisasi diawali dengan tahapan pengangkatan isu melalui peran media massa, pengaruh partai Republik yang diusung Donald Trump, kemudian dilanjutkan dengan tahapan meyakinkan khalayak melalui penyampaian tuturan oleh Donald Trump, Sebastian Gorka, Michael Flynn dan Jeff Sessions. Kemudian dengan mengeluarkan tindakan darurat dan sekuritisasi dilegitimasi oleh audiens yang dibuktikan dengan meningkatnya suara publik AS yang mendukung perluasan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Donald Trump, Imigran, dan Sekuritisasi

The issue of securitization regarding immigrants in the US is an issue that has become a public discussion since Donald Trump's campaign as a US presidential candidate in the 2016 election. He has publicly conveyed xenophobic anti-immigrant rhetoric. Researchers assume that the existence of securitization makes the issue of immigrants a threat that endangers US national security. This is done by conveying speech acts to influence public opinion, thus making the issue of immigrants a problem that requires emergency handling or extraordinary policies that have never been carried out by the previous government. This study aims to describe the stages of the securitization process on the issue of immigrants in the US during the Donald Trump administration. This research was analyzed with the conceptual framework of the securitization stages of Barry Buzan, Waever, and Jaap de Wilde, which consisted of the stage of raising the issue and the stage of convincing the audience. This research method uses a qualitative approach with descriptive-analytical research and uses secondary data sources. This study found that the securitization process begins with the stages of raising issues through the role of the mass media, the influence of the Republican party promoted by Donald Trump, then continues with the stage of convincing the audience through the delivery of speeches by Donald Trump, Sebastian Gorka, Michael Flynn and Jeff Sessions. Then by issuing emergency and securitization measures legitimized by the audience as evidenced by the increasing US public voice supporting the expansion of the US-Mexico border wall.

Keywords: *Donald Trump, Immigrants, Securitization, and United States*

PENDAHULUAN

Isu imigran sudah menjadi bagian penting dari sejarah perpolitikan Amerika Serikat (AS) yang dibuktikan dengan adanya gagasan bahwa AS merupakan bangsa imigran klasik. Gagasan ini tertulis dalam buku "A Nations of Immigrants" yang ditulis oleh Presiden AS, John F. Kennedy pada tahun 1958 (Volpp, 2015). Nilai bangsa Amerika yang merupakan tanah kebebasan terkandung dalam puisi pada plakat Patung Liberty, di mana hal ini menggambarkan bahwa AS merupakan tanah harapan bagi orang miskin, tertindas, dan orang-orang yang haknya dirampas di negara asalnya, lalu kemudian mencari kehidupan yang lebih baik di AS. Sejatinya, AS dianggap sebagai surga kebebasan untuk para imigran dari seluruh dunia (Amar, 2006).

Pada tahun 2017, AS menjadi negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia (López, 2017). Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah imigran yang ada di AS pada tahun 2017 mencapai angka 44,4 juta, angka ini menyumbang 13,6% dari semua penduduk di AS. Sejalan dengan itu, 77% dari jumlah imigran di AS masuk secara legal, sedangkan 23% sisanya masuk secara ilegal (Radford, 2019). Isu imigran menjadi hangat diperbincangkan setelah adanya kebijakan War on Terror sebagai respon dari tragedi 9/11. Kebijakan ini tak hanya membawa dampak buruk terhadap imigran Muslim, namun juga terhadap semua imigran di AS (A. Ewing et al., 2015).

Pandangan dan stereotip negatif terhadap imigran semakin mencuat ke permukaan pada masa kampanye calon presiden AS tahun 2016. Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik secara terbuka menyampaikan serangkaian retorika anti-imigran, dan ujaran kebencian kepada semua kelompok imigran yang bersifat xenophobic (Verea, 2018). Di antara kelompok imigran yang paling dikecam Trump dalam pidato kampanye pemilihannya adalah imigran Meksiko dan imigran Muslim (Chacko, n.d.). Hal ini terlihat dalam pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa imigran ilegal dari Meksiko adalah penjahat, pengedar narkoba, pemerkosa dan hanya membawa masalah bagi keamanan nasional AS (William Santoso, 2018).

Sejalan dengan itu, imigran terus digambarkan sebagai ancaman eksistensial bagi AS, khususnya imigran ilegal. Di mana mereka juga dianggap merugikan ekonomi AS karena membebani negara, menjadi penjahat yang merebut pekerjaan penduduk Amerika, serta menurunkan standar upah minimum mengingat jumlah pencari kerja dari kelas imigran lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Lange, 2019). Mereka juga dianggap mengancam kesejahteraan masyarakat AS dengan menggambarkan mereka sebagai bagian dari "krisis kemanusiaan dan keamanan" (Shelton & T, 2017). Di mana mereka juga melakukan penyeludupan narkoba, human trafficking, perampokan, penipuan dan prostitusi (U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration, 2018).

Di sisi lain, bukti empiris membantah pernyataan Trump yang menuduh semua imigran sebagai penjahat dan mengancam keamanan nasional AS. Di mana umumnya imigran yang datang ke AS ialah pencari suaka dan pengungsi yang mencari perlindungan dari kejahatan dan kondisi buruk di negara asalnya, seperti kejahatan gangsters dan kartel narkoba, ketidakstabilan kondisi ekonomi-politik, serta masalah keamanan lainnya yang mengharuskan mereka melewati perbatasan secara ilegal karena mengingat sistem keimigrasian AS yang ketat (Mathema, 2018). Kemudian, meskipun jumlah imigran mengalami kenaikan dari tahun 1990 (19,8 juta) ke tahun 2017 (41,3 juta), namun tingkat kejahatan menurun 48%, termasuk dalam kasus penyerangan, pemerkosaan dan pembunuhan.

Sayangnya, Trump tetap mengambil tindakan darurat sebagai upaya sekuritisasi dengan memperluas tembok perbatasan AS-Meksiko, hingga mengeluarkan kebijakan Travel Ban di awal pemerintahannya (International Crisis Group, 2018). Dr. Ryan Burke menilai jika Trump menggunakan otoritas eksekutifnya untuk "mendeklarasikan keadaan darurat nasional" terhadap isu imigran meski melanggar politik normal (Burke & Matisek, n.d.). Profesor Flona de Londras juga menyatakan bahwa perintah eksekutif merupakan bentuk dari upaya sekuritisasi, karena perintah eksekutif tersebut memberlakukan pengecualian menyeluruh, daripada melakukan analisis keamanan individu terhadap para imigran, dan di situlah letak klaim diskriminasi daripada kontrol perbatasan yang sah (University of Birmingham, n.d.). Apalagi upaya sekuritisasi ini juga didukung oleh sederet pejabat AS, dan partai Republik. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sekelompok orang dalam pemerintahan memengaruhi publik dengan melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu imigran di AS.

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif-analisis dan menggunakan sumber data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan kerangka berpikir dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde yang menjelaskan bahwa sekuritisasi merupakan langkah yang diambil dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya. Secara sederhana, keamanan diartikan sebagai upaya untuk bertahan, sedangkan sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari upaya politik (Buzan et al., 1998).

Penelitian deskriptif-analisis yang menggunakan teori Buzan, Waever, Jaap de Wilde menjelaskan bahwa jika dalam melakukan analisa terhadap keamanan dan pengartikulasian keamanan melalui pendekatan speech-act, diperlukan lima unit yang berhubungan dengan upaya analisa proses sekuritisasi, antara lain terdiri dari *Referent objects*, *Securitizing actors*, *Existential Threat*, *Functional actors*, dan *Audience*. Yang mana, pemilihan terhadap lima unit upaya sekuritisasi tersebut dilakukan dikarenakan mampu

menjelaskan proses sekuritisasi pada fenomena masalah imigran AS era Donald Trump. Dan hal tersebut juga mendukung penelitian untuk mencapai kesimpulan penelitian yang deskriptif.

Di samping itu, penelitian juga menggunakan teori dari Copenhagen School untuk menjelaskan ada dua tahap dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terhadap suatu isu “Tahap Pemunculan Isu” dan “Tahap Meyakinkan Audience” yang akan menjelaskan keberhasilan dari upaya sekuritisasi yang dilakukan Trump. Dengan menggunakan skema dari para ahli tersebut, penelitian dengan menggunakan data sekunder serta metode deskriptif-analisis dapat dilakukan dengan sistematis dan saintis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus ini, ditemukan bahwa pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump telah melakukan upaya sekuritisasi terhadap isu imigran melalui dua tahapan, yakni tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan audience.

1. Tahap Pemunculan Isu

Tahap ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aktor sekuritisasi dalam menggambarkan sebuah isu, orang-orang, kelompok atau entitas sebagai ancaman bagi objek keamanan/ *referent objects* (School, n.d.). Pada penelitian ini, yang menjadi *referent objects* nya adalah negara AS dan masyarakat asli AS. Sedangkan yang menjadi ancaman eksistensial dan berpotensi mengancam keamanan *referent objects* adalah kelompok imigran yang ada di AS, khususnya imigran ilegal. Di mana isu imigran digambarkan sebagai isu keamanan yang lebih diutamakan oleh pemerintah AS dibandingkan dengan isu-isu lainnya yang juga tidak kalah penting, seperti isu ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dll.

Dalam penelitian ini, pihak yang bertindak sebagai aktor sekuritisasi adalah Pemerintah AS, seperti Presiden Donald Trump, Jeff Sessions, Michael Flynn, Sebastian Gorka, serta anggota partai Republik. Donald Trump sebagai aktor dominan dalam proses sekuritisasi memunculkan isu imigran pada masa kampanyenya yang menyudutkan kelompok imigran sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, sekaligus menjadikan isu imigran sebagai prioritas utama dalam strategi keamanan nasional di masa pemerintahannya. Meskipun tidak ada peristiwa besar yang mendorong pemerintah AS di masa Trump mengambil langkah yang lebih ketat terhadap masalah imigran, seperti tragedi 9/11 di masa Bush dan krisis pengungsi anak tanpa pendamping di masa Obama. Selama masa kampanye, Trump lebih menonjolkan isu imigran dalam menggaet perhatian publik AS.

Trump secara terbuka menyampaikan retorika anti-imigrannya yang terus menyebut kelompok imigran sebagai ancaman eksistensial bagi keamanan nasional AS. Trump menjelaskan beberapa bentuk ancaman yang ditimbulkan

oleh kelompok imigran yang memasuki AS secara ilegal, seperti adanya ancaman terhadap identitas, keamanan negara serta kesejahteraan ekonomi masyarakat AS. Ancaman terhadap identitas nasional AS mengarah kepada bahasa, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang di lingkungan bangsa Amerika. Ketika para imigran bersikeras untuk berbicara dalam bahasa yang berbeda dari negara tuan rumah, hal tersebut dipandang sebagai penghinaan terhadap budaya dan identitas nasional (S. Larsen et al., 2009). Penggunaan bahasa Spanyol dan bahasa lainnya di AS tetap menjadi inti dari ancaman yang semakin meningkat yang dirasakan oleh penduduk asli AS terhadap aspek identitas (S. Larsen et al., 2009).

Di sisi lain, pemakaian pakaian/atribut keagamaan juga dapat menunjukkan adanya keterasingan dari perbedaan nilai dan kepercayaan antara kelompok imigran dengan penduduk asli negara tuan rumah, di mana hal ini dapat memicu sikap anti-imigran di lingkungan masyarakat (S. Larsen et al., 2009). Aspek ini merujuk pada pemakaian hijab dan cadar/burqa oleh wanita imigran Muslim di AS, penampilan tertutup yang ditunjukkan wanita imigran Muslim terlihat jauh berbeda dengan nilai dan kebiasaan wanita AS yang cenderung terbuka, itulah sebabnya bahasa dan agama juga dianggap berpotensi mengikis identitas nasional AS.

Keamanan negara AS juga berada di posisi yang tidak aman atas hadirnya imigran ilegal di wilayah perbatasan AS-Meksiko karena adanya ancaman aksi terorisme, penyelundupan narkoba, human trafficking, peningkatan angka kriminalitas, serta masalah keamanan lainnya. Ancaman kejahatan terorisme merupakan hal yang paling ditakuti oleh AS atas hadirnya imigran ilegal. Hal ini didasari kepada laporan dari Center for Immigration Studies yang melaporkan ada sekitar 15 imigran yang dikonfirmasi memiliki hubungan dengan kelompok teroris pat dalam rentang waktu 2001-2018 (Bensman, 2018). Kemudian juga terdapat 17.621 dari 38.132 imigran ilegal yang ditahan karena melakukan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar (Negeri, 2018). Kehadiran imigran sebagai bentuk ancaman eksistensial juga didukung oleh narasi bahwa imigran ilegal merebut pekerjaan penduduk asli AS serta membebani anggaran negara meskipun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Proses pemunculan isu imigran oleh Trump juga terlihat dalam slogan kampanyenya hingga ia menjabat sebagai Presiden, yaitu "Make America Great Again" yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat AS. Slogan tersebut menggambarkan bahwa Trump merupakan kandidat dari Partai Republik yang cenderung ke sayap kanan dan berupaya membawa AS kembali ke masa kejayaannya dalam kerangka kerja America First. Pada kerangka kerja ini, Trump lebih mengutamakan kepentingan masyarakat asli AS dibandingkan dengan kelompok imigran yang ada di AS. Trump kembali membahas identitas bangsa Amerika dengan membedakan self (warga Asli AS) dan others (imigran) yang mengarah pada pembagian lawan dan kawan, serta peluang dan ancaman.

Pada dasarnya, isu imigran ke ranah publik AS tak serta merta muncul begitu aja, namun mulai menjadi sorotan publik karena adanya peran dari pihak yang menyokong isu ini agar tetap menjadi pembicaraan publik, yakni media dan pers. Pembingkai media ini menyebabkan kebencian rasial dan sikap anti-imigran yang kemudian menjadi faktor penentu kemenangan Trump pada pemilu 2016. Di samping itu, tahap pemunculan isu imigran sebagai ancaman juga dipengaruhi oleh pandangan Partai Republik yang lebih bersifat konservatif, dan cenderung melihat imigran sebagai ancaman bagi keamanan AS, sehingga membatasi jumlah imigran merupakan cara terbaik dalam menciptakan rasa aman dan lingkungan yang kondusif bagi warga AS. Selain itu, Partai Republik juga lebih memilih kebijakan imigrasi yang ketat dan efektif dalam membatasi jumlah imigran ilegal, seperti dengan melakukan penangkapan dan deportasi bagi imigran ilegal yang memasuki AS melalui wilayah perbatasan AS-Meksiko (Hammer & Kafura, 2019).

Media berkontribusi dalam memberitakan sisi baik Trump terkait retorika dan kebijakan konservatif Trump mengenai masalah imigran, khususnya media yang bias terhadap Trump seperti Fox News yang condong ke arah konservatif. Mereka yang memiliki sikap anti-imigran lebih cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai Republikan, dan penelitian telah menemukan bahwa peralihan suara pada tahun 2016 dari Obama ke Trump didorong oleh sikap rasial terhadap isu imigran di AS.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwasanya isu imigran menjadi isu penting dan krusial di perpolitikan AS sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu kemudian terus bertahan dan lebih populer pada masa kampanye pemilihan Presiden AS tahun 2016, dengan menghadirkan Donald Trump sebagai kandidat Partai Republik yang cenderung konservatif dan anti-imigran. Isu imigran semakin menjadi sorotan publik karena adanya narasi-narasi imigran sebagai ancaman bagi keamanan negara dan masyarakat AS, di samping adanya peningkatan dari jumlah imigran yang melintasi wilayah perbatasan AS-Meksiko secara ilegal. Selain itu, peran media dan pers juga sangat besar dalam memengaruhi opini publik AS dalam memandang isu imigran yang cenderung mengarah ke pandangan negatif.

2. Tahap Meyakinkan Audience

Pada tahap kedua ini, aktor sekuritisasi melakukan upaya untuk meyakinkan audience (opini publik, politisi, aparat militer, atau elit lainnya) bahwa terdapat objek keamanan yang posisinya benar-benar terancam, sehingga membutuhkan tindakan luar biasa untuk mengatasinya (R, 2007). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah AS dalam sekuritisasi terhadap suatu isu ialah melalui penyampaian *speech-act*. Buzan dkk menjelaskan bahwa *speech-act* merupakan tindakan aktor sekuritisasi untuk menyampaikan ide kepada publik serta mengkampanyekan berbagai bentuk ancaman eksistensial terkait isu-isu yang diwacanakan mengancam keberadaan objek ancaman (Buzan et al.,

1998). Selama masa kampanyenya, Trump meningkatkan popularitas dan pengaruhnya untuk membentuk opini publik dengan serangkaian pidato dan cuitannya di media sosial terhadap isu imigran. Trump lebih menyudutkan imigran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal. Dan hal tersebut juga didukung oleh beberapa aktor sekuritisasi dari kalangan pejabat pemerintahan AS melalui pernyataannya yang secara tidak langsung menyetujui dan mendukung retorika anti-imigran.

Dan untuk menggaet lebih banyak dukungan, Trump juga menyampaikan janjinya untuk membuat AS menjadi hebat lagi sebagaimana yang ia sampaikan pada debat presiden AS 2016, "I want to make America great again and I'm going to be able to do it" Melalui pernyataan tersebut Trump berjanji akan membawa perubahan positif dan akan mengembalikan masa kejayaan AS yang hebat dalam bidang militer, ekonomi, sosial dan bidang kehidupan lainnya serta aman dari segala macam ancaman, khususnya dari ancaman yang dibawa oleh imigran ilegal.

Dalam pernyataan tersebut ia juga menyampaikan bahwa ia sedang berusaha mewujudkan janji kampanyenya dengan menang dalam pemilu 2016. Di mana ia menyampaikan pidato tersebut saat berkampanye di Tampa, Florida: "The good news is, if we win on November 8th, these jobs are coming back" (Zeinussiddiqi, 2017). Melalui pernyataan tersebut ia berjanji jika ia menang pemilu nanti, ia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan warga asli AS dengan mengembalikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap telah direbut oleh kelompok imigran. Persepsi jika imigran telah merebut pekerjaan masyarakat asli AS telah lama berkembang di publik AS. Apalagi ketika Trump menyampaikan bahwa pekerja ilegal Meksiko telah diuntungkan dalam perjanjian perdagangan The North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Oleh karena itu, Trump terus meminta dukungan kepada publik AS agar memilihnya di pemilu 2016 untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dalam menjaga kepentingan dan keamanan nasional AS, khususnya dari ancaman yang dibawa oleh kelompok imigran. Kemenangan Trump dalam pemilu 2016 membuktikan jika warga AS percaya jika masa depan AS akan lebih baik di masa pemerintahan Trump, khususnya dalam mengatasi masalah imigran yang menjadi isu yang sering diperjual belikan dalam kampanyenya untuk menggaet para voters. Setelah dilantik menjadi Presiden, pemerintahan Trump langsung mengambil tindakan darurat atau aksi luar biasa di luar politik normal dalam merealisasikan janji kampanyenya yang juga merupakan bagian dari sekuritisasi seperti yang dijelaskan oleh Buzan. Sebagai langkah penanganan terhadap isu yang merupakan ancaman eksistensial, aktor sekuritisasi akan mengeluarkan tindakan yang bersifat darurat, terpaksa dan unilateral atau sepihak (Buzan et al., 1998).

Untuk terus meyakinkan audience bahwa imigran adalah ancaman eksistensial bagi keamanan nasional AS, pemerintahan Trump mengeluarkan

tindakan darurat di luar politik normal untuk mengatasi masalah imigran. Di awal pemerintahannya, Trump langsung mengambil kebijakan memperluas tembok perbatasan AS-Meksiko untuk menghalangi masuknya gerombolan imigran ilegal. Di mana kebijakan ini merupakan janji utama Trump dan arti penting kebijakan ini dapat dilihat dari ratusan tweet yang sudah ia post di laman twitternya sejak tahun 2014 dengan menulis, "*Secure The Border! Build A Wall*". Trump juga menjelaskan bahwa AS perlu mengikuti langkah Cina dalam membuat tembok raksasa yang dibangun selama ratusan tahun untuk melindungi Cina dari penjajah asing yang terus menyerang mereka dari wilayah perbatasan barat.

Di samping itu, pemerintah Trump juga mengambil tindakan darurat dengan mengeluarkan kebijakan Travel Ban yang melarang masuknya imigran dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai reaksi terhadap ancaman terorisme yang digaungkan oleh Sebastian Gorka selaku Wakil Asisten Presiden yang menyatakan bahwa ketika AS menerima imigran dan pengungsi Muslim, maka sama saja AS melakukan "bunuh diri nasional" dan ia juga mengklaim bahwa Islam dan Alquran menjadi dasar dari banyak terorisme (Stampler, 2017). Michael Flynn selaku Penasihat Keamanan Nasional Presiden di masa pemerintahan Trump juga menyebut bahwa Islam adalah kanker ganas di dalam tubuh 1,7 miliar orang yang harus disingkirkan.

Tindakan darurat aktor sekuritisasi dalam kebijakan Travel Ban juga terlihat dari adanya beberapa revisi terhadap perintah eksekutif Trump. Pertama, perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Januari 2017 yang melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim, kemudian direvisi pada Maret 2017 dengan menghapus Irak dari daftar negara yang dilarang tersebut, hingga akhirnya direvisi lagi pada Juni 2017 dengan menambah negara Chad, Korea Utara, dan Venezuela pada daftar negara yang dilarang masuk ke AS, serta menghapus Sudan dari daftar. Adanya waktu peralihan dari perintah eksekutif versi pertama hingga versi kedua dan ketiga yang tidak membutuhkan waktu yang lama menunjukkan jika masalah keamanan AS terkait imigran dalam kondisi yang tidak aman. Sehingga diperlukan kebijakan Travel Ban untuk mempercepat deportasi dan pembatasan imigran Muslim ke AS yang dianggap membahayakan keamanan AS.

Di samping itu, Trump juga melakukan aksi luar biasa lainnya dalam mengeluarkan kebijakan Travel Ban ini. Di mana Trump memberhentikan pejabat penting Jaksa Agung Sally Yates. Trump menilai Yates tidak tegas dalam menegakkan hukum mengenai keamanan nasional, khususnya terkait masalah imigran ilegal. Selain itu, Yates menolak tindakan eksekutif Trump terkait larangan masuknya imigran dari tujuh negara Muslim dengan alasan bahwa kebijakan itu tidak sesuai dengan hukum/konstitusi AS (Guardian, 2017). Tindakan ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya,

sehingga tindakan tersebut dikecam oleh Partai Demokrat karena Trump membungkam suara yang mengatakan kebenaran.

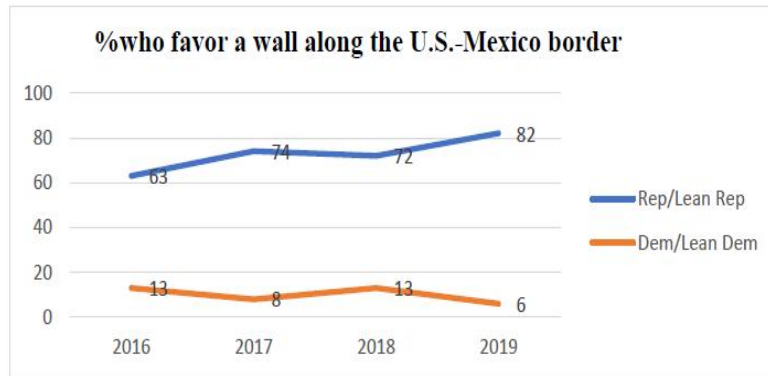
Kemudian, pemerintah AS juga mengambil aksi luar biasa/tindakan darurat melalui kebijakan Zero Tolerance yang juga merupakan respon terhadap pernyataan Jeff Sessions yang mengatakan bahwa imigran ilegal telah membahayakan nyawa warga Amerika dan pemerintah telah bersumpah untuk melayani dan melindungi warga Amerika. Secara tidak langsung, ia menekankan bahwa semua warga AS harus bisa menerima dan mendukung setiap upaya dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi masalah imigran, meskipun berbeda dan melampaui politik normal. Hal ini mengingat besarnya ancaman yang dibawa oleh kelompok imigran ke AS, sehingga pemerintah harus selalu meyakinkan audience bahwa apa yang disampaikan pemerintah terkait isu imigran adalah benar adanya. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintahan Trump telah berusaha mencegah masuknya imigran ilegal ke AS, namun masalah itu tetap tidak bisa diselesaikan karena dampak dari lemahnya kebijakan imigrasi dalam beberapa dekade terakhir.

Oleh karena itu, ia kemudian mendukung dan menjadi aktor dibalik dikeluarkannya kebijakan Zero Tolerance pada tahun 2018. Kebijakan Zero Tolerance juga merupakan tindakan darurat dari pemerintahan Trump dalam mengatasi masalah imigran, khususnya imigran ilegal. Kebijakan Zero Tolerance di masa Trump lebih menekankan penangkapan dan penahanan setiap orang dewasa yang memasuki AS secara ilegal, dan kemudian mereka akan dituntut secara pidana serta mereka akan dipisahkan dengan anak-anak mereka secara paksa tanpa tau kapan proses reunifikasi akan dilakukan.

Pada masa pemerintahan Barack Obama, kebijakan Zero Tolerance lebih ditekankan pada langkah "*Catch and Release*" atau "menangkap dan membebaskan" dari pada menangkap dan memisahkan keluarga imigran ilegal seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Trump (Senate, 2019). Langkah Obama tersebut didasarkan pada aturan politik normal yang mengharuskan pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan isi Perjanjian Flores 1997, di mana DHS harus membebaskan anak-anak imigran ilegal dari tahanan setelah 20 hari. Perbedaan langkah yang diambil oleh Trump dan Obama disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka, di mana Trump menganggap aturan pemisahan keluarga akan memberikan efek jera. Selain itu, pemerintahan Trump juga menilai jika kebijakan Obama yang didasarkan pada aturan politik normal tidak mampu mengatasi masalah imigran ilegal di perbatasan, mengingat masih tingginya jumlah imigran ilegal yang memasuki AS di masa pemerintahannya.

Speech-act dan serangkaian tindakan darurat yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi mampu meyakinkan publik agar nantinya melegitimasi isu yang disekuritisasi sebagai sebuah ancaman. Keberhasilan upaya sekuritisasi pemerintah AS terhadap isu imigran dapat dilihat dari meningkatnya jumlah

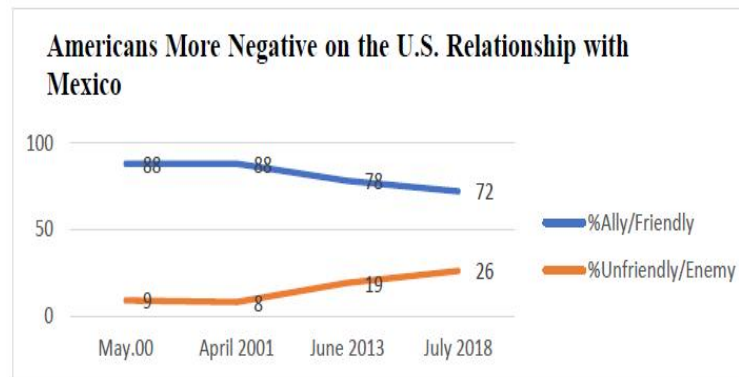
orang Amerika yang mendukung perluasan tembok perbatasan sebagai langkah untuk menekan angka imigran yang memasuki wilayah perbatasan AS-Meksiko secara ilegal. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center dari tahun 2016-2017 menunjukkan terjadi peningkatan suara dalam perluasan pembangunan tembok perbatasan.



Gambar 4. 1 Presentase Pendukung Perluasan Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasanya sejak tahun 2016, jumlah masyarakat AS yang mendukung perluasan pembangunan tembok perbatasan terus mengalami peningkatan. Angka tersebut adalah 34% pada tahun 2016 yang kemudian meningkat menjadi 35% pada tahun 2017, 37% pada tahun 2018 dan 40% pada tahun 2019. Selain itu, juga terjadi peningkatan jumlah partisan partai Republik yang mendukung tembok perbatasan, meningkat dari angka 63% di tahun 2016, 74% di tahun 2017, 72% di tahun 2018, dan naik lagi menjadi 82% di tahun 2019. Meskipun kondisi yang berbeda terjadi pada partai Demokrat yang cenderung mengalami penurunan angka pada orang-orang yang mendukung perluasan tembok perbatasan.

Sejalan dengan itu, juga terdapat survei yang dilakukan oleh Pew Research Center terkait pandangan masyarakat AS terhadap imigran Meksiko sebagai orang yang baik/sekutu atau musuh.



Gambar 4. 2 Pandangan Masyarakat AS Terhadap Hubungan AS-Meksiko

Dari gambar di atas dapat dilihat jika terjadi peningkatan pada jumlah masyarakat AS yang melihat Meksiko sebagai musuh/tidak baik bagi AS. Angka tersebut meningkat dari 8% pada tahun 2001, 19% pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 26% pada tahun 2018. Lalu, juga terjadi penurunan angka yang memandang Meksiko sebagai sekutu AS. Perubahan angka-angka di atas dipengaruhi oleh speech-act yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah AS dalam memunculkan isu imigran sebagai ancaman yang membahayakan keamanan AS, khususnya dari imigran ilegal Meksiko yang disering disudutkan sebagai penjahat, penyelundup narkoba, pemerkosa dan "membunuh" AS di sektor ekonomi.

Kemudian, juga terdapat survei yang dilakukan oleh Pew Research Center terkait pandangan masyarakat AS terkait kebijakan mendeportasi imigran ilegal ke negara asalnya di tahun 2016 dan 2019.

Deporting all immigrants who are living in the U.S. illegally back to their home country.					
	Strongly favor %	Favor %	Oppose %	Strongly oppose %	No Opinion %
2019 Jan 21-27	17	20	31	30	2
2016 Jun 7-July 1	14	18	35	31	1

Gambar 4. 3 Pandangan Masyarakat AS Terkait Deportasi Imigran Ilegal

Dari gambar di atas dapat dilihat jika terjadi peningkatan dalam angka yang menyetujui kebijakan deportasi imigran ilegal ke negara asalnya.

Kelompok yang mendukung kebijakan ini meningkat dari angka 18% pada tahun 2016 menjadi 20% pada tahun 2019. Lalu, kelompok yang menolak kebijakan ini menurun dari angka 31% pada tahun 2016 ke angka 30% pada tahun 2019. Perubahan suara ini juga tidak terlepas dari speech-act yang disampaikan oleh pemerintah AS terkait bahaya yang dibawa oleh imigran ilegal terhadap keamanan nasional AS.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan jika pemerintah AS melakukan sekuritisasi isu imigran sebagai bentuk upaya lebih tegas dalam mengatasi masalah imigran yang dianggap membawa ancaman terhadap keamanan negara dan segenap masyarakat AS, khususnya imigran ilegal yang terus membanjiri wilayah perbatasan AS-Meksiko. Tahap pemunculan isu dilakukan dengan menjadikan isu imigran sebagai isu sentral dalam masa kampanye Trump, hingga pada agenda utama kebijakan AS pada masa pemerintahan Donald Trump, serta juga tidak terlepas dari peran media. Lalu, tahap meyakinkan audience yang dilakukan aktor sekuritisasi dengan penyampaian speech-act serta adanya aksi luar biasa di luar politik normal atau tindakan darurat dalam merespon masalah imigran, seperti pemberhentian pejabat penting, membangun tembok perbatasan AS-Meksiko, kebijakan Travel Ban, hingga kebijakan Zero Tolerance.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Amar, A. (2006). *America's Constitution: A Biography; The Records of the Federal Convention of 1787*. Max Farrand, 70.
- Buzan, B., Waver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner.
- School, C. (n.d.). *Securitization Theory to the Copenhagen School*. Retrieved February 21, 2021, from <http://books.openedition.org/iheid/719>

Journal article

- A. Ewing, W., E. Martinez, D., & G. Rumbaut, R. (2015). *The Criminalization of Immigration in the United States*.
- Bensman, T. (2018). *Have Terrorists Crossed Our Border? An initial count of suspected terrorists encountered en route and at the U.S. Southwest Border Since 2001*.
- Burke, R., & Matisek, J. (n.d.). *Executive Orders and Troops on the Border: Political Norms and The Securitization of American Problems*. Modern War Institute. Retrieved June 7, 2021, from <https://mwi.usma.edu/executive-orders-troops-border-political-norms-securitization-american-problems/>
- Chacko, E. (n.d.). *Immigration and Populist Policies in The United States of America*. 3.
- Hammer, B., & Kafura, C. (2019). *Republicans and Democrats in Different Worlds on Immigration*. He Chicago Council on Global Affairs.
- International Crisis Group. (2018). *Mexico's Southern Border: Security, Violence and Migration in the Trump Era*.
- Lange, N. (2019). *Speaking and Perceiving Security: A Case Study of the Trump Administration's Securitization of Illegal Immigration Fueling Populism in US*. Malmo University.
- López, G. (2017). *Key Finding about US Immigrants*.
- Mathema, S. (2018). *They Are (Still) Refugees: People Continue to Flee Violence in Latin American Countries*. Center of American Progress.
- R, E. (2007). Securitization. *Contemporary Security Studies, Ed.*, 342.
- Radford, J. (2019). *Key finding about US Immigrants*.
- S. Larsen, K., Krumov, K., Van Le, H., Ommundsen, R., & van der Veer, K. (2009). Threat Perception and Attitudes Toward Documented and Undocumented Immigrants in the United States: Framing the Debate and Conflict Resolution. *European Journal of Social Science*, 7(4), 117.
- Shelton, & T, J. (2017). Diagnosing Europe: Greece, Macedonia, and the Meaning of Crisis. *New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics*, 19.

- University of Birmingham. (n.d.). *Trump's Immigration Ban: A Legacy of Securitized Immigration Rhetoric?* University of Birmingham. Retrieved June 7, 2021, from <https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/trump-immigration-ban.aspx>
- Verea, M. (2018). *Anti-Immigrant and Anti-Mexican Attitudes And Policies during the First 18 Months of the Trump Administration*. 13(2), 198. <https://doi.org/DOI:10.22201/cisan.24487228e.2018.2.335>
- Volpp, L. (2015). The Indigenous As Alien. 5 *U.C. Irvine L.Rev*, 5(2), 289–290.
- William Santoso, Y. (2018). Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 11.
- Zeinussiddiqi, M. (2017). *Commissive Speech Acts on Donald Trump and Hillary Clinton at US Presidential Debate*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- De Vaus, D. A. (2014). *Surveys in social research*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.

Webpage with an author

- Guardian, T. (2017). *Sally Yates fired by Trump after acting US attorney general defied travel ban*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/30/justice-department-trump-immigration-acting-attorney-general-sally-yates>

Newspaper article

- Stampler, L. (2017). *Trump's Deputy Assistant, Sebastian Gorka, Has Frequently Denounced Islam*. Teen Vogue. <http://www.teenvogue.com/story/trumps-deputy-assistant-sebastian-gorka-has-frequentlydenounced-islam>

Government publication

- Senate, T. U. S. (2019). *Judicial Rulings Ending the Obama Administration's Family Detention Policy: Implications for Illegal Immigrations and Border Security*. U.S. Department of Justice Drug Enforcement Administration. (2018). *2018 National Drug Threat Assesment*.